

BAB II

GAMBARAN PERKEMBANGAN DISKRIMINASI PENDIDIKAN YANG DIALAMI OLEH PEREMPUAN DI AFGHANISTAN.

2.1 Kondisi Pendidikan Perempuan di Afghanistan.

Afghanistan merupakan negara yang terletak di Asia bagian tengah yang berdekatan dengan Iran pada bagian barat dan Pakistan di bagian timur. Afghanistan tidak lazim dikenal sebagai negara dengan tingkat diskriminasi perempuan yang cukup tinggi. Meskipun demikian pada masa pemerintahan Amir Habibullah Khan pada tahun 1900 – 1919, perempuan di Afghanistan justru menikmati kebebasan berpendidikan dan diperkenalkan kepada pendidikan modern yang terus berlanjut hingga masa pemerintahan Raja Amanullah Khan pada tahun 1919 - 1929.³¹ Bahkan dalam implementasinya, pemerintahan Afghanistan saat itu sudah menerapkan pemberian beasiswa ke luar negeri untuk pendidikan perempuannya.³² Hal ini terus berlanjut dan berkembang hingga tahun 1930an pada kepemimpinan selanjutnya yaitu Raja Mohammed Nadir Shah sehingga banyak perempuan di Afghanistan turut berkontribusi dalam perkembangan dan kesejahteraan Afghanistan itu sendiri melalui sektor pendidikan. Ditengah – tengah masa kepemimpinan Raja Mohammed Zahir Shah,

³¹ Manasi Gopalakrishnan, (2022), *A Brief History of Afghan Women's Right*, Deutsche welle (DW), diakses pada <https://www.dw.com/en/a-brief-history-of-afghan-womens-rights/a-60449450>, (03/03/2024, 07.54 WIB)

³² European Foundation For South Asian Studies, (2022), *Sekuriti Pendidikan di Afghanistan*, EFSAS, diakses pada <https://www.efsas.org/publications/articles-by-efsas/the-securitization-of-education-in-afghanistan/>, (15/02/2024, 11.17 WIB)

yaitu pada tahun 1950an pendidikan bagi perempuan di Afghanistan bahkan menjadi hal yang wajib, sebab keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja ternyata sangat tinggi dan membangun.³³

Kendati demikian setelah terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Afghanistan ternyata ikut terdampak terutama pada sistem pemerintahannya sehingga terjadi ketidakstabilan politik baik dalam maupun luar negeri. Hubungan Afghanistan dengan Amerika Serikat serta Uni Soviet yang amat fluktuatif cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat Afghanistan. Uni Soviet yang hendak menyebar luaskan ideologinya yang bertentangan dengan Amerika Serikat kemudian menyasar negara – negara muslim dari Timur Tengah hingga Asia Tengah termasuk Afghanistan. Dampak dari sekularisasi yang terjadi di Afghanistan ternyata juga bagian dari rencana Amerika Serikat yang semakin lama menjadi revolusi kebudayaan yang isinya menentang Islam. Uni Soviet yang mengkhawatirkan pengaruh Amerika Serikat meluas di wilayah negara muslim kemudian juga tak tinggal diam menebarkan pengaruhnya ke Afghanistan, sehingga timbul invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1970an.³⁴

Propaganda Islam yang diusung oleh Uni Soviet sebagai kekuatan dalam menguasai Afghanistan menyebabkan banyak terjadi perpecahan dalam masyarakat Afghanistan itu sendiri yang berpengaruh terhadap kualitas

³³ *Ibid.*

³⁴ Sulistyono Adi, (2008), *Mengenal Afghanistan*, Jurnal Al- Jamiah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses pada <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/517/>, (03/03/2024, 08.13 WIB)

pendidikan perempuan di Afghanistan pada masa itu.³⁵ Meskipun pendidikan perempuan di Afghanistan di beberapa kota besar semakin mengalami perkembangan khususnya setelah mendapatkan dorongan dan bantuan dana internasional pasca bergabung dengan PBB, namun terjadi kesenjangan pendidikan antar perempuan di Afghanistan yang saat itu berada dibawah invasi Uni Soviet.³⁶ Maraknya budaya sekularisasi pada seluruh sektor termasuk pendidikan, membuat perempuan Afghanistan di kota – kota besar masih mendapatkan kesempatan dalam bekerja secara professional, memegang posisi dalam pemerintahan, maupun mengenyam pendidikan yang tidak hanya layak tetapi juga tinggi. Di Ibukota Afghanistan, Kabul 60% dari 10.000 mahasiswa bahkan merupakan perempuan pada tahun 1990. Namun, lain halnya dengan mayoritas perempuan di Afghanistan yang tinggal di daerah terpencil hingga ke tempat pengungsian yang sama sekali tidak mendapatkan pendidikan yang layak.³⁷ Ketidak stabilan politik di Afghanistan yang terjadi selama lebih dari 20 tahun memaksa masyarakat terutama perempuan mengesampingkan pentingnya pendidikan karena merasa hal tersebut bukanlah prioritas utama dalam membantu mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara kembali terutama ketika terjadi perang saudara antara para Mujahidin yang memenangkan perang . Hal ini kemudian berakhir dengan pengambilalihan pemerintah Afghanistan oleh Taliban

³⁵ Ahda Abid, al-Ghifari, (2013), *Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban*, Universitas Negeri Yogyakarta, diakses pada <https://eprints.uny.ac.id/21178/>, (16/02/2024, 15.36 WIB)

³⁶ Anwar Firdaus Mutawally, (2022), *Perkembangan Pendidikan di Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)*, Jurnal Tsaqofah & Tarikh, Vol. 7 No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.

³⁷ Larry P. Goodson, (2001), *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*, University of Washington Press, hal 91 – 132, diakses pada <https://www.jstor.org/stable/j.ctvcwntp5.8>, (17/02/2024, 11.00 WIB)

pertama kalinya pada tahun 1990an yang disinyalir merupakan kelompok Islam radikal, sehingga semakin memunculkan diskriminasi pendidikan yang dialami oleh perempuan di Afghanistan.³⁸

2.2 Awal Mula Terjadinya Diskriminasi Pendidikan pada Perempuan di Afghanistan.

2.2.1 Pendidikan Perempuan di Afghanistan Pada Masa Taliban Lama

Lembaga – lembaga pendidikan di Afghanistan telah lama ditinggalkan oleh perempuan Afghanistan sebab telah menjadi institusi politik yang terombang – ambing diantara sekularisasi dan penafsiran agama yang konservatif. Diskriminasi pendidikan perempuan di Afghanistan pada masa ini menjadi salah satu yang paling berpengaruh dan kentara dalam menghambat perempuan memperoleh hak asasi mereka. Pada masa sebelum rezim Taliban lama ini diperkirakan sekitar 70% guru sekolah, 50% pelajar, dan 40% dokter di Kabul, ibukota Afghanistan sebenarnya merupakan perempuan.³⁹

Metode pemerintahan yang diusung oleh rezim Taliban lama ini lebih mengedepankan hukum Islam yang sangat menolak modernitas. Sistem pendidikan yang digunakan pada masa rezim Taliban lama ini kebanyakan mengambil acuan dari Pakistan sebab kebanyakan petinggi Taliban merupakan lulusan madrasah di Pakistan yang menganut ajaran Deobandi dan Wahabisme. Madrasah di Afghanistan pada masa rezim Taliban lama ini terbagi menjadi dua jenis yaitu *Darul Hifaz* yang dikhususkan sebagai sekolah menghafal Al-Qur'an

³⁸ *ibid*

³⁹ Benedikta Miranti T. V, (2021), *Sejarah Taliban Tindas Wanita, Dilarang Bekerja dan Sekolah hingga Harus Tutup Aurat*, Liputan 6, diakses pada <https://www.liputan6.com/global/read/4633266/sejarah-taliban-tindas-wanita-dilarang-bekerja-dan-sekolah-hingga-harus-tutup-aurat?page=2> (15/02/2024, 10.11 WIB)

dan *Madaris* yang merupakan sekolah yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu lainnya.⁴⁰ Meskipun demikian, kebanyakan isi dari pembelajaran yang dilakukan lebih berfokus pada meningkatkan semangat Jihad bagi siswa sehingga keberadaan pelajar perempuan dirasa tidak perlu oleh rezim Taliban lama tersebut.

Hal ini kemudian mengakibatkan diskriminasi pendidikan pada perempuan yang terjadi di masyarakat Afghanistan oleh rezim Taliban lama semakin bertambah.⁴¹ Salah satunya seperti pembubaran institusi pendidikan modern, mengurangi hak pendidikan bagi perempuan, dan mengubah kurikulum pendidikan dengan menyeleksi bahan ajar bagi para siswa.⁴² Perempuan tidak lagi diijinkan untuk masuk ke dalam sektor pendidikan dari segala aspek yang terkandung didalamnya, diantaranya yaitu dilarangnya perempuan menjadi seorang guru maupun pekerjaan – pekerjaan praktikal lainnya, pemecatan tenaga didik perempuan ini bahkan tidak disertai pesangon yang membuat keluarga dengan kepala keluarga perempuan banyak mengalami kemiskinan. Pendidikan yang diterima oleh perempuan di Afghanistan pada rezim Taliban lama hanya sebatas sekolah dasar yang mengajarkan bagaimana menjadi ibu rumah tangga, kemudian anak perempuan diatas usia delapan tahun dilarang bersekolah. Sekolah perempuan dan *home schooling* yang dapat mereka jadikan sebagai alternatif pun juga dilarang dan tidak diperkenankan serta ditekan jumlahnya bagi perempuan di Afghanistan.⁴³

⁴⁰ Anwar Firdaus Mutawally, Op. Cit, hal 170

⁴¹ Taufik Adnan Amal, (2004), *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta Pustaka Alvabet.

⁴² European Foundation For South Asian Studies, Op. Cit, hal 4.

⁴³ Anwar Firdaus Mutawally, Op. Cit, hal 171

Buku – buku yang beredar juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi agama yang didalamnya terdapat ketimpangan gender yang masif yang mengecualikan perempuan dari kehidupan bermasyarakat di Afghanistan.⁴⁴ Pada masa rezim Taliban lama ini bahkan pemerintah memenjarakan dan mendeportasi orang yang menawarkan pekerjaan dan sekolah rumahan (*home schooling*) bagi perempuan di Afghanistan.⁴⁵ Tindakan diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan lainnya salah satunya yaitu menghancurkan poster – poster pendidikan publik terutama pada layanan kesehatan kemudian membuat banyak perempuan yang buta huruf semakin tidak tereduksi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak berhenti disitu, indoktrinasi juga dilakukan oleh pemerintah Afghanistan rezim Taliban lama ini kepada laki – laki di institusi pendidikan melalui ideologi agamis konservatif yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan hak perempuan atas pendidikan di Afghanistan.

Banyaknya support dari negara – negara islam lainnya seperti Arab Saudi setelah Uni Soviet dan Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan memang sangat membantu dan digunakan oleh rezim Taliban lama ini pada pemajuan dan pengembangan pendidikan, tetapi hal ini berfokus pada laki – laki dan tetap tidak membuat perempuan dilibatkan maupun merasakan pendidikan tersebut.⁴⁶ Bahkan

⁴⁴ Fred M. Hayward, MO Babury, (2015), *Innovation in higher education in developing countries: the example of Afghanistan*, British Council, London, Inggris, Vol. 4, diakses pada <https://www.researchgate.net/publication/280113867> Innovation in higher education in developing countries the example of Afghanistan Fred M Hayward M O Babury Going Global Volume 4 2015 IOE Press British Council London England, (17/02/2024, 11.14 WIB)

⁴⁵ Benedikta Miranti, Loc. Cit.

⁴⁶ Mir Hekmatullah Sadat, (2004), *History of Education in Afghanistan*, Lemar-Aftaab, diakses pada <https://reliefweb.int/report/afghanistan/history-education-afghanistan>, (17/02/2024, 11.27 WIB)

diskriminasi terhadap perempuan di Kecamatan dari PBB terhadap sistem pendidikan yang patriarki ini selalu ditentang oleh Taliban dengan dalih merencanakan pendidikan perempuan yang terpisah dari laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan undang – undang pendidikan oleh rezim Taliban lama pada ayat 2 tahun 2001 yang menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Afghanistan wajib menempuh pendidikan secara gratis, dan pendidikan perempuan Afghanistan akan disesuaikan dengan syariat islam beserta dokumen khusus yang tidak diungkap kepada publik.⁴⁷ Pasca terjadinya peristiwa pengeboman di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, rezim Taliban lama ini kemudian dikalahkan oleh invasi Amerika Serikat atas dasar balas dendam.

2.2.2 Pendidikan Perempuan di Afghanistan Pada Masa Invasi Amerika Serikat

Invasi Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2001 hingga 2021 dapat dikatakan sebagai bantuan dan merupakan harapan bagi perempuan di Afghanistan.⁴⁸ Bersamaan dengan terbentuknya pemerintahan baru oleh invasi Amerika Serikat, perempuan di Afghanistan yang sebelumnya mengalami diskriminasi pendidikan mulai kembali dikenalkan dan berkesempatan dalam mengakses pendidikan melalui upaya rekonstruksi pendidikan di Afghanistan melalui berbagai macam program kerjasama antara pemerintah Afghanistan, UN

⁴⁷ Rahmatullah Amiri, Ashley Jackson, (2021), *Taliban Attitudes and Policies Towards Education*, ODI, diakses pada <https://odi.org/en/publications/taliban-attitudes-and-policies-towards-education/>, (02/03/2024, 13.39 WIB)

⁴⁸ Madeline Fitzgerald, Brianna Navarre, (2023), *A Timeline of Women's Rights in Afghanistan*, U.S News, diakses pada <https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/womens-rights-in-afghanistan-a-timeline?slide=4>, (03/03/2024, 08.44 WIB)

Women, UNESCO, dan UNICEF.⁴⁹ Berbagai aturan, kebijakan, program dan pelayanan yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan mendasar terkait diskriminasi pendidikan terhadap perempuan dibuat, salah satunya dengan pengembangan kurikulum pendidikan umum yang baru pada tahun 2002.⁵⁰ Program ini lebih menasar pada sektor pendidikan dan pemberdayaan yang dilaksanakan dengan cara yang efektif sehingga hak – hak perempuan dalam mengenyam pendidikan dapat kembali terwujud dan dirasakan oleh perempuan di Afghanistan.

UN Women yang pada saat itu juga bekerjasama dengan UNESCO yang berada dibawah naungan PBB menjumpai adanya perubahan yang amat drastis pada sektor pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Pada tahun 2001 tercatat kemajuan besar pada sektor pendidikan yaitu terdافتarnya satu juta siswa pada semua tingkat pendidikan yang ada yang kemudian terus berkembang dari tahun ke tahun hingga menjadi sepuluh kali lipat atau sekitar sepuluh juta siswa pada semua tingkat pendidikan di Afghanistan di tahun 2018.⁵¹ Jumlah sekolah yang ada di Afghanistan secara keseluruhan pun ikut meningkat dengan jumlah awal 6000 sekolah pada 2001, menjadi hampir 18.000 sekolah pada 2018.⁵² UNESCO juga memberikan perbandingan perbedaan terkait jumlah pelajar perempuan dengan

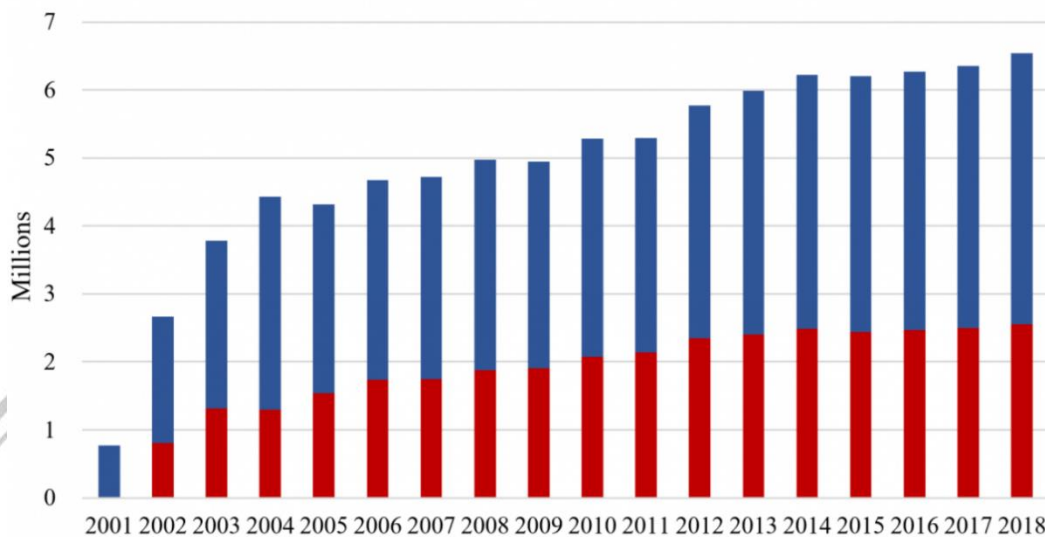
⁴⁹ UNESCO Office in Kabul, (2011), *Compendium Afghanistan: National and International Commitments on the Equal right of All Children to Quality Education in Inclusive and Child-Friendly Settings*, UNESDOC by UNESCO, diakses pada <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190806>, (17/02/2024, 11.34 WIB)

⁵⁰ Anwar Firdaus Mutawally, Op. Cit, hal 175.

⁵¹ UNESCO, (2023), “*Melindungi Pendidikan di Afghanistan*”, diakses pada (21/12/2023, 14.06 WIB)

⁵² Geneva Graduate Institute Norrag Global Education Center, (2021), *Pendidikan Anak Perempuan di Afghanistan: Kemajuan dan Tantangan*, NORRAG, diakses pada <https://www.norrag.org/girls-education-in-afghanistan-progress-and-challenges-by-yixin-wang/> (01/07/2024, 15.48 WIB)

laki – laki dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2018 yang menunjukkan adanya kemajuan pada pendidikan yang diberikan secara adil kepada perempuan di Afghanistan.⁵³



Gambar 2. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Pelajar di Afghanistan berdasarkan Gender dari tahun 2001 – 2018

Sumber: Institut Statistik UNESCO

Perkembangan jumlah pelajar perempuan di Afghanistan yang ditandai sebagai warna merah pada grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada 2001 jumlah pelajar perempuan yang hampir mendekati satu juta pelajar kemudian menjadi 2,5 juta pelajar perempuan secara keseluruhan pada tahun 2018. Selain itu, jumlah pelajar perempuan di Afghanistan dari seluruh tingkatan berdasarkan laporan kemajuan tahunan Kementerian pendidikan Afghanistan pada tahun 2020 bahkan telah mencapai 40 % dari jumlah seluruh pelajar Afghanistan atau kurang lebih 4 juta pelajar perempuan.⁵⁴

⁵³ Op. Cit, UNESCO, (2021), *The Right to Education: What's at Stake in Afghanistan a 20-year riview*, hal 17.

⁵⁴ *Ministry of Education: Islamic Republic of Afghanistan, (2020), Annual Progress Report, MoE: Islamic Republic of Afghanistan*, diakses pada <https://moe.gov.af/sites/default/files/2021->

Tidak hanya jumlah pelajar perempuan yang meningkat, tingkat literasi bagi perempuan juga meningkat seperti yang terdapat pada gambar dibawah sejumlah 12%. Literasi merupakan kemampuan dasar yang penting dan tidak hanya berpengaruh bagi kualitas hidup seseorang melainkan juga berpengaruh terhadap banyak aspek lainnya didalam kehidupan terutama bagi perempuan di Afghanistan. Selain membantu perempuan di Afghanistan lebih memahami terkait asupan gizi yang mereka dapatkan, hal ini juga mempengaruhi kesehatan mereka dan keluarganya, kemampuan literasi juga membantu mereka berpartisipasi dalam masyarakat, meningkatkan angka partisipasi kerja secara menyeluruh di Afghanistan yang secara tidak langsung juga membantu membangun perekonomian Afghanistan.⁵⁵

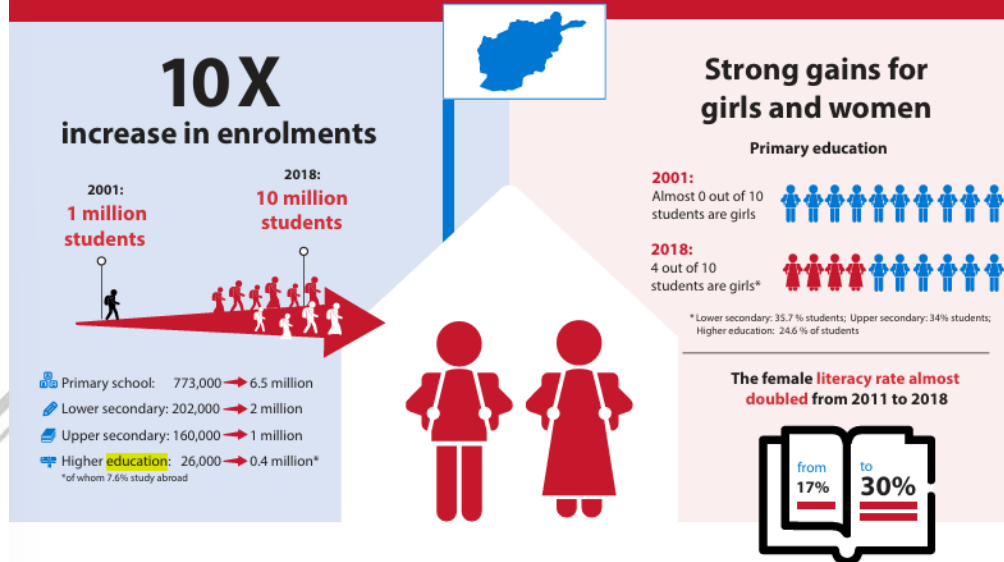
Meskipun persentase tingkat literasi mengalami kenaikan, namun adanya peningkatan pada minat literasi perempuan di Afghanistan menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi dan menghambat hal tersebut. Diantaranya diskriminasi yang diperoleh oleh perempuan di Afghanistan yaitu normalisasi buta huruf bagi orang dewasa (pada umur 15 tahun keatas) baik laki – laki maupun perempuan di Afghanistan, kesenjangan gender antara laki – laki dan perempuan membuat banyak perempuan mengalami buta huruf, status sosial dan ekonomi keluarga, serta tempat tinggal (daerah perkotaan atau pedesaan), yang mana 90% perempuan yang tinggal di pedesaan mulanya buta huruf dibandingkan dengan laki – laki.⁵⁶

[04/MoE%20ENGLISH%20Annual%20Progress%20Report1399-2020.pdf](#), (01/07/2024, 16.19 WIB)

⁵⁵ UNESCO, Op. Cit. hal 17

⁵⁶ UNESCO, Op. Cit, hal 16

20 years of **education** progress in Afghanistan

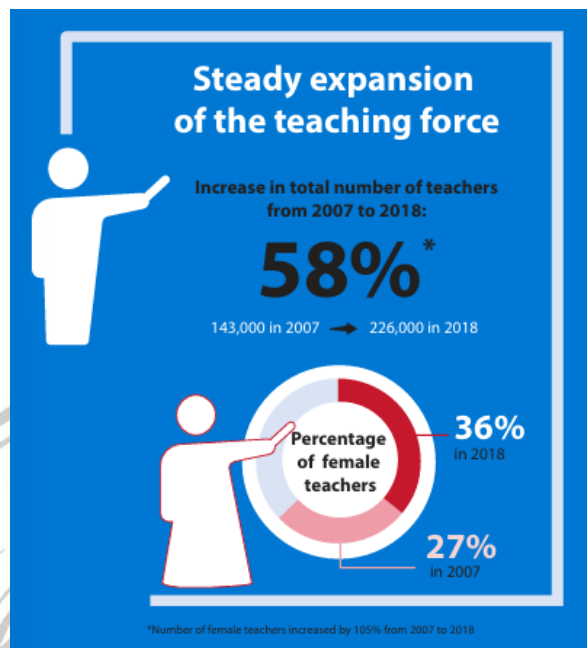


Gambar 2. 2 Progres Pendidikan Perempuan di Afghanistan tahun 2001 – 2018
Sumber: UNESCO Institute for Statistic

Pada tahun – tahun ini, UN Women sendiri lebih berfokus terhadap pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Melalui kerjasama UN Women dengan UNICEF, masalah perempuan di sektor pendidikan lebih banyak ditangani oleh UNICEF. Program yang dibuat tidak hanya meningkatkan jumlah pelajar perempuan di Afghanistan tetapi juga meningkatkan jumlah pengajar perempuan di Afghanistan.⁵⁷ Peningkatan guru perempuan yang cukup signifikan mulanya terlihat pada tahun 2007 yaitu dengan jumlah guru perempuan sekitar 140.000 yang kemudian meningkat sekitar dua kali lipat pada tahun 2018 yaitu sekitar 220.000 guru perempuan Afghanistan.⁵⁸

⁵⁷ UNESCO, Op. Cit. hal 23

⁵⁸ European Foundation for South Asian Studies, Op. Cit, hal 22



Gambar 2. 3 Peningkatan Guru di Afghanistan
 Sumber: UNESCO Institute for Statistics

Meskipun demikian, upaya ini tentunya tidak dapat menghapus diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan sepenuhnya, namun tetap memberikan dampak yang positif yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan perempuan di Afghanistan.⁵⁹ Hal ini disebabkan ketidaksiapan pemerintahan Afghanistan masa invasi Amerika Serikat atau yang biasa disebut pemerintahan Karzai pada meningkat pesatnya kebutuhan fasilitas pendidikan dari segala tingkatan di seluruh penjuru Afghanistan. Kapasitas sektor publik di Afghanistan kemudian dengan cepat mencapai batasnya sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi pada sektor pendidikan di Afghanistan. Munculnya lembaga – lembaga swasta dalam mengisi kesenjangan kelembagaan dan institusi pendidikan akibat kurangnya kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi perempuan Afghanistan menjadi salah satu penunjang dalam

⁵⁹ World Education News + Review, (2016), *Education in Afghanistan*, WES WENR, diakses pada <https://wenr.wes.org/2016/09/education-afghanistan>, (03/03/2024, 09.16 WIB)

pertumbuhan jumlah pelajar perempuan terutama pada perguruan tinggi. Hal ini kemudian memunculkan tantangan baru yaitu kesenjangan terhadap penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Begitupun dengan akreditasi yang dilakukan pada perguruan tinggi swasta yang belum terlaksana dengan baik mengakibatkan mudahnya lembaga swasta disusupi oleh kepentingan – kepentingan seperti perluasan jaringan politik maupun agama.⁶⁰

Perkembangan pesat yang dialami oleh perempuan di Afghanistan pada masa invasi Amerika Serikat di sektor pendidikan terasa menjanjikan dan masih dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Banyaknya ruang bagi perbaikan sistem baik pada pemerintahan maupun pada pola yang sudah tertanam dalam masyarakat yang patriarki yang telah diwakili oleh kesenjangan gender di bidang pendidikan ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintahan Afghanistan masa invasi Amerika Serikat, namun tabiat perkembangan pendidikan ini kemudian berhenti setelah pada Agustus 2021 rezim Taliban kembali menguasai pemerintahan Afghanistan. Perempuan di Afghanistan tentunya mengalami kerisauan akan kembalinya mereka kepada masa dimana pendidikan adalah hal yang hanya boleh dinikmati oleh laki – laki saja. Banyak terjadi penolakan oleh perempuan di Afghanistan yang ditanggapi oleh rezim tersebut dengan menyatakan bahwasannya rezim Taliban baru kali ini berbeda dengan rezim

⁶⁰ European Foundation for South Asian Studies, Op. Cit, hal 6

Taliban sebelumnya dan akan lebih melindungi hak – hak perempuan terutama dalam mengenyam pendidikan yang aman dan setara.⁶¹

2.2.3 Pendidikan Perempuan di Afghanistan Pada Masa Taliban Baru

Diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan kembali terjadi dan lebih diperparah ketika rezim Taliban baru kembali menguasai pemerintahan Afghanistan. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan, sehingga kelompok / rezim Taliban pada 15 Agustus 2021 kemudian berhasil merebut Ibukota Kabul dan menduduki kursi pemerintahan Afghanistan. Kembalinya rezim Taliban ini kemudian memunculkan banyak kebijakan baru terutama pada hal yang berkaitan dengan pendidikan perempuan di Afghanistan. Rezim Taliban baru ini menyerukan janji bahwa pemerintahan mereka berbeda dengan Taliban pada masa lampau yang tidak memperlakukan perempuan sebagai manusia yang setara. Bahkan rezim ini berjanji akan melindungi hak – hak perempuan termasuk dalam mengenyam pendidikan. Janji ini bahkan disampaikan oleh juru bicara dari rezim Taliban baru pemerintah Afghanistan sendiri di tahun 2021 pada konferensi internasional di Moskow (Rusia) dan konferensi internasional di Doha.⁶²

Namun pada November 2021, rezim Taliban baru ini kemudian membuat kebijakan yang bertimpangan dengan apa yang mereka sampaikan di muka umum, yaitu kebijakan yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan di

⁶¹ Haris Fadhil, (2021), *Taliban Janjikan Rezim Berbeda dari Masa Lalu Usai Rebut Afghanistan*, Detiknews, diakses pada <https://news.detik.com/internasional/d-5686131/taliban-janjikan-rezim-berbeda-dari-masa-lalu-usai-rebut-afghanistan>, (03/03/2024, 11.19 WIB)

⁶² Tamana Sarwary, (2021), *Taliban Janji Wanita Afghanistan Bisa Sekolah dan Kuliah*, CNN Indonesia, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210818151908-113-681969/taliban-janji-wanita-afghanistan-bisa-sekolah-hingga-kuliah>, (14/12/2023, 18.42 WIB)

Afghanistan.⁶³ Diantara kebijakan tersebut terdapat larangan terkait ruang kelas yang bercampur antara laki – laki dan perempuan, guru – guru perempuan yang mengajar di kelas laki – laki maupun sebaliknya, dan seragam sekolah maupun busana yang dikenakan perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan syari’at islam sehingga muncul kewajiban menggunakan burqa dan niqab. Alasan yang diberitakan kepada publik selalu berkaitan dengan reformasi dari regulasi sekolah yang tidak sesuai dengan syari’at islam. Pejabat Kementerian Pendidikan Afghanistan yaitu Noorullah Munir bahkan menyatakan larangan ini hanyalah sementara, guna memperbaiki budaya dan sistem pendidikan yang ada.⁶⁴ Ia juga menyampaikan bahwasannya hal lain yang mendukung kebijakan larangan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan diberlakukan ialah karena 20.000 sekolah resmi di Afghanistan, 9.000nya tidak beroperasi, 5.000 diantaranya merupakan sekolah tanpa bangunan, dan 4.000 sisanya memerlukan adanya rehabilitasi⁶⁵. Kebijakan dan berbagai aturan baru diperkenankan kepada perempuan yang pada ujungnya membawa kembali diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan. Perempuan pada awalnya masih diperkenankan untuk bersekolah dengan berbagai syarat dan ketentuan yang membatasi perempuan di Afghanistan, tetapi kemudian perempuan di Afghanistan dihentikan dari sekolah dengan tujuan reformasi sistem maupun perubahan

⁶³ Parwiz, (2021), *Taliban Akan Izinkan Perempuan Afghanistan Kuliah*, CNN Indonesia, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210916104008-113-695127/6-aturan-taliban-yang-kekang-perempuan-afghanistan>, (16/02/2024. 16.05 WIB)

⁶⁴TOLOnews, (2022), *Pejabat: Sekolah Perempuan Ditutup Karena ‘Kendala Budaya’* TOLOnews, diakses pada <https://tolonews.com/afghanistan-179313>, (01/07/2024 16.23 WIB)

⁶⁵Mangkok, (2022), *Keterbatasan Budaya jadi Alasan Utama di Balik Penutupan Sekolah Perempuan*, Pajhwok Afghan News, diakses pada <https://pajhwok.com/2022/08/08/cultural-restraint-main-reason-behind-closure-of-girls-schools/>, (01/07/2024, 16.53 WIB)

kurikulum pendidikan di Afghanistan yang sesuai dengan syari'at islam menurut rezim Taliban baru tersebut.

Menteri Pendidikan Tinggi Taliban baru, Abdul Baqi Haqqani bahkan menyampaikan bahwa perempuan boleh menempuh pendidikan tetapi dengan memisahkan ruang kelas antara laki – laki dan perempuan, dalam kebijakan yang mengatur pendidikan perempuan di Afghanistan. Berkaitan dengan hal tersebut, jam belajar perempuan juga harus selesai beberapa menit sebelum pembelajaran bagi laki – laki dimulai.⁶⁶ Salah satu guru yang berasal dari Afghanistan tetapi menetap di Inggris yaitu Angela bahkan berusaha mendirikan sekolah yang dapat dihadiri secara online agar perempuan dapat tetap meneruskan pendidikan meskipun telah dilarang oleh pemerintah Afghanistan rezim Taliban baru. Sebagai seorang guru yang membela hak – hak perempuan, dia merasa hal ini sudah diluar dari sekedar pembatasan dan memutuskan untuk mendirikan sekolah online tersebut.⁶⁷ Kejadian yang menimpa perempuan di Afghanistan tidak hanya menyedihkan bagi perempuan di Afghanistan saja, tetapi oleh seluruh perempuan di dunia. Sekolah online ini bahkan diikuti oleh hampir 1.000 perempuan di Afghanistan dengan 400 relawan guru yang kebanyakan berasal dari Iran. Kelas yang ditawarkan pun ada beragam mulai dari pendidikan dasar seperti matematika, hingga pelajar seni dan kelas memasak. Hal ini dilakukan sembari

⁶⁶ CNN Indonesia, (2021), *6 Aturan Taliban yang Kekang Perempuan Afghanistan*, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210916104008-113-695127/6-aturan-taliban-yang-kekang-perempuan-afghanistan>, (15/02/2024, 11.51 WIB)

⁶⁷ Firouzeh Akbarian, (2021), *Afghanistan: Cerita guru mendirikan 'sekolah online' agar anak – anak perempuan dapat bersekolah lagi setelah dilarang Taliban*, BBC NEWS, diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59129344>, (16/02/2024, 16.23 WIB)

menunggu kebijakan dan sistem baru pada tahun ajaran baru pada bulan Maret 2022.

Kendati demikian, pada Maret 2022 ketika memasuki tahun ajaran baru pun, perempuan terpaksa harus kembali kerumah dikarenakan gerbang sekolah tidak terbuka bagi perempuan itu sendiri.⁶⁸ Hal ini tentu menjadi pertanyaan baik bagi perempuan Afghanistan maupun bagi masyarakat Internasional terlebih dengan segala janji yang di sampaikan oleh rezim Taliban pemerintah Afghanistan sendiri. Dalam wawancara bersama CNN di Kabul, salah satu pejabat Taliban yang juga menjadi Menteri dalam negeri Afghanistan yaitu Sirajuddin Haqqani muncul ke dalam wawancara bahkan kembali menyebutkan bahwa perempuan Afghanistan tidak perlu risau karena akan segera datang kabar baik terkait perizinan perempuan dalam menempuh pendidikan. Ia bahkan menyampaikan lelucon bahwa “perempuan nakal seharusnya tetap tinggal dirumah”. Kata nakal dalam leluconnya ini kemudian dikonfirmasi mengacu kepada perempuan yang ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang membuat reputasi pemerintah Afghanistan atau rezim Taliban menjadi buruk dihadapan dunia. Haqqani bahkan mengatakan bahwa kecaman masyarakat Internasional terkait penilaian, penelitian dan pengambilan keputusan adalah tanggapan yang bersifat sepihak. Alasan lain seperti masih dininya umur pemerintahan

⁶⁸ Asnida Riani, (2022), *Taliban Ingkar Janji Lagi, Perempuan Afghanistan Hanya Boleh Sekolah Sampai Kelas 6 SD*, Liputan6, diakses pada <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4920619/taliban-ingkar-janji-lagi-perempuan-afghanistan-hanya-boleh-sekolah-sampai-kelas-6-sd>, (03/03/2024, 09.34 WIB)

Afghanistan rezim Taliban juga dilontarkan demi menjawab situasi yang belum kembali normal di Afghanistan.⁶⁹

Hal ini ternyata berkebalikan dengan fakta yang terjadi di lapangan, Pada Desember 2022 rezim Taliban kembali mengeluarkan kebijakan larangan pendidikan bagi perempuan dalam memasuki universitas.⁷⁰ Kebijakan – kebijakan yang secara beruntun dikeluarkan ini semakin merampas hak – hak perempuan terutama dalam mengenyam pendidikan. Tidak hanya pelajar perempuan, guru dan dosen perempuan juga mengalami diskriminasi terhadap sumbangsinya terhadap dunia pendidikan. Pada rezim Taliban baru pemerintah Afghanistan, terdapat kurang lebih 20 kebijakan verbal maupun non-verbal terkait pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diberlakukan, perempuan di Afghanistan semakin kehilangan haknya dalam mengenyam pendidikan. Diantaranya melarang pendidikan bersama, pendidikan menengah bagi anak perempuan di atas 10 tahun, dan pembatasan pada jurusan – jurusan tertentu bagi mahasiswi seperti jurnalisme, pertanian, kedokteran hewan, ilmu hukum, dan ekonomi. Bahkan larangan ini kemudian diperparah dengan kembalinya dikeluarkan larangan untuk perempuan mengikuti ujian masuk tahunan

⁶⁹ Jo Shelley. et al, (2022), “*Top Taliban Leader Makes More Promises on Women’s Rights but Quips ‘Naughty Women’ Should Stay Home*”, CNN, diakses pada <https://edition.cnn.com/2022/05/18/asia/amanpour-haqqani-taliban-women-interview-intl/index.html>, (14/12/2023, 18.49 WIB).

⁷⁰ Deutsche Welle, (2022), *Afghan Women Condemn the Taliban's Ban on Studying*, diakses pada <https://www.dw.com/id/perempuan-afganistan-kecam-larangan-berkuliah-oleh-taliban/a-64182350>, (04/03/2024, 09.37 WIB)

universitas.⁷¹ Di beberapa daerah otonom, pemerintah Afghanistan bahkan meminta kepala sekolah untuk menseleksi dan memulangkan siswa perempuan dengan umur lebih dari 10 tahun atau di atas kelas tiga SD sama seperti yang dilakukan oleh rezim Taliban lama. Bahkan ketika perempuan kembali untuk bersekolah terdapat pasukan bersenjata di depan gerbang untuk mengusir perempuan secara paksa.

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa perempuan di depan institusi pendidikan juga berimbas terhadap kekerasan yang memaksa mereka untuk kembali pulang dan diam dirumah.⁷² Hingga Januari 2024, perempuan di Afghanistan masih belum diperkenankan untuk kembali menempuh pendidikan, Menteri pendidikan pada pemerintahan Afghanistan rezim Taliban baru kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memerlukan banyak waktu untuk mereformasi institusi pendidikan sebelumnya yang lemah dan kurang sesuai dengan syariat islam yang telah diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.⁷³

Tabel 2. 1 Perbandingan Kondisi Pendidikan, dan Persentase Populasi Pelajar pada Masa Pemerintahan di Afghanistan

No.	Pemerintahan	Kondisi Pendidikan Perempuan di Afghanistan	Persentase Pelajar Perempuan di Afghanistan
1.	Masa Pemerintahan Monarki Afghanistan 1900-1994 (4,8 juta	Pendidikan perempuan di masa ini mencapai masa perkembangan	Lebih dari 50% perempuan di Afghanistan atau

⁷¹ Belquis Ahmadi, Hodel Sultan, (2023), *Taking a Terrible Toll: The Taliban's Education Ban*, United States Institute of Peace, diakses pada <https://www.usip.org/publications/2023/04/taking-terrible-toll-talibans-education-ban>, (04/03/2024, 09.50 WIB)

⁷² Yagita Limaye, Aakriti Thapar, (2021), *Perempuan di Afghanistan dipukuli Taliban karena Berunjuk Rasa Menuntut Hak – ‘Saya akan tetap bersuara, sampai mereka membunuh kami’*, BBC News Indonesia, diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58496553>, (04/03/2024, 09.55 WIB)

⁷³ Afghan Islamic Press, (2024), *Education Minister Says Inherited Weak Educational Institutions from Previous Government*, diakses pada <https://www.afghanislamicpress.com/en/news/99735>, (04/03/2024, 10.03 WIB)

	jiwa populasi perempuan) ⁷⁴	yang cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan dibukanya sekolah perempuan pertama di Afghanistan, jumlah pelajar perempuan yang terus meningkat, adanya program beasiswa keluar negeri bagi perempuan, dan pemerataan pendidikan bagi perempuan baik di desa maupun di kota. Pada masa ini tercatat 237.000 pelajar perempuan yang menempuh pendidikan. Tidak hanya itu, 22.000 perempuan lainnya bahkan berprofesi sebagai guru. ⁷⁵	sekitar 2,4 juta perempuan telah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
2.	Masa pemerintahan rezim Taliban lama 1994 – 2001 (11, 6 juta jiwa populasi perempuan) ⁷⁶	Pendidikan perempuan di masa ini cenderung mengalami kemunduran akibat dari rezim yang membawa ajaran Deobandi dan Wahabisme serta sekularisasi yang merupakan dampak dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perempuan tidak lagi diperkenankan untuk mengenyam pendidikan apabila sudah berusia	Pada mulanya 50% pelajar yang terdapat di Afghanistan merupakan perempuan, kendati demikian angka persentase ini semakin menurun hingga di bawah 10% atau sekitar 1 juta jiwa pelajar perempuan akibat dari kebijakan yang membatasi pendidikan perempuan.

⁷⁴ Data World Bank, (2022), *Populasi Perempuan di Afghanistan*, World Bank, diakses pada https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN?end=2023&locations=AF&most_recent_year_desc=true&skipRedirection=true&start=1960&view=chart, (01/07/2024, 17.40 WIB)

⁷⁵ UN Women, (2023), *Perempuan di Afghanistan: Dari Mana Saja Hingga Hampir Tidak Ada Sama Sekali.*, UN Women, diakses pada <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/08/women-in-afghanistan-from-almost-everywhere-to-almost-nowhere>, (08/03/2024, 12.11 WIB)

⁷⁶ Population Pyramid, (2022), *Populasi Afghanistan tahun 2001*, Population Pyramid, diakses pada <https://www.populationpyramid.net/afghanistan/2001/>, (01/07/2024, 17.48 WIB)

		<p>lebih dari 8 – 10 tahun. Pendidikan yang didapatkan oleh perempuan hanya sebatas pendidikan membina rumah tangga. Pendidikan secara umum yang diajarkan kepada laki – laki pun mengecualikan hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.</p>	
3.	<p>Masa pemerintahan invasi Amerika Serikat 2001 – 2021 (19 juta jiwa populasi perempuan)⁷⁷</p>	<p>Pendidikan perempuan di masa ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan masuknya UN Women, UNESCO, dan UNICEF dalam membantu pemerataan pendidikan dan kesenjangan gender. Meningkatnya jumlah pelajar perempuan, tingkat literasi perempuan, dan pengajar perempuan di Afghanistan menjadi salah satu kondisi baik yang terus berkembang pada masa ini. Meskipun pemerataan pendidikan bagi perempuan di kota dan di daerah masih perlu ditingkatkan, namun perempuan sudah memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Bersamaan dengan hal tersebut, jumlah tenaga medis</p>	<p>Peningkatan pelajar perempuan di Afghanistan pada masa ini mencapai lebih dari 75% atau sekitar 14,3 juta jiwa pelajar perempuan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang tercatat secara sipil.</p>

⁷⁷ Population Pyramid, (2023), *Populasi Perempuan di Afghanistan tahun 2021*, Population Pyramid, diakses pada <https://www.populationpyramid.net/afghanistan/2021/>, (01/07/2024, 17.52 WIB)

		perempuan juga mulai meningkat, suara perempuan di pemerintahan mulai di pertimbangkan, dan perempuan juga mendapatkan kebebasan dalam berpendapat.	
4.	Masa Pemerintahan rezim Taliban baru 2021 – 2024 (21,5 juta jiwa populasi perempuan)	Pendidikan perempuan di masa ini kembali menjumpai resesi. Kembali rezim Taliban ke kursi pemerintahan menimbulkan berbagai kebijakan yang merenggut kebebasan perempuan terutama dalam mengenyam pendidikan. Alasan yang di berikan oleh rezim Taliban baru ini selalu berkaitan dengan reformasi kurikulum agar sesuai dengan syari'at islam. Namun, pada implementasinya perempuan kembali kepada sistem pendidikan di masa lampau dimana hanya anak perempuan dengan batas maksimal usia 10 tahun saja yang boleh mengenyam pendidikan dasar. Banyak terjadi demonstrasi di berbagai institute pendidikan oleh perempuan di Afghanistan. Kendati demikian, perempuan justru dipaksa kembali kerumah dengan menggunakan	Pada masa pemerintahan ini, 80% perempuan atau sekitar 17 juta jiwa perempuan di Afghanistan tidak dapat kembali bersekolah akibat larangan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Hal ini kemudian juga menyebabkan 30% atau kurang lebih 6,5 juta jiwa anak perempuan sama sekali tidak mengenyam pendidikan. ⁷⁸

⁷⁸UNESCO, (2023), *Biarkan anak Perempuan dan Perempuan di Afghanistan Belajar!*, UNESCO, diakses pada <https://www.unesco.org/en/articles/let-girls-and-women-afghanistan-learn>, (01/07/2024, 18.06 WIB)

		kekerasan. Penekanan jumlah pengajar perempuan juga dilakukan sehingga banyak perempuan tidak hanya kehilangan mimpinya dalam mengenyam pendidikan tinggi tetapi juga kehilangan pekerjaannya sebagai tenaga ajar.	
--	--	--	--

2.3 Kesetaraan Gender pada Perempuan di Afghanistan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penghormatan dalam hak asasi manusia baik bagi perempuan maupun laki – laki dimana keduanya memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai seorang manusia.⁷⁹ Terjadinya diskriminasi bagi perempuan di Afghanistan pada sektor pendidikan merupakan salah satu pertanda adanya ketidaksetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat di Afghanistan. Ketidaksetaraan gender ini dapat dipicu oleh berbagai hal, salah satunya yaitu pengaruh dari otoritas yang sedang berkuasa pada kursi pemerintahan seperti yang terjadi di Afghanistan sejak tahun 2021. Kesetaraan Gender menurut Tim Direktorat SMP dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yaitu:

a. Akses

Tidak adanya akses perempuan di Afghanistan dalam mendapatkan haknya pada pendidikan membuktikan bahwa permasalahan tersebut termasuk dalam ketidaksetaraan gender di Afghanistan. Membedakan gender untuk dapat

⁷⁹ Op. Cit, Agus Hermanto, hal 218

memperoleh haknya dalam mengakses pendidikan merupakan tindakan yang tidak menghormati perempuan sebagai manusia, dan hak asasi manusia itu sendiri. Kebijakan pertama dikeluarkan oleh pemerintah Afghanistan rezim Taliban pada September 2021 yang melarang anak perempuan bersekolah di jenjang sekolah menengah, yang kemudian disusul dengan larangan pendidikan bagi perempuan di tingkat universitas pada Desember 2021 merupakan bentuk ketidak setaraan pada poin akses. Pemerintah Afghanistan rezim Taliban baru ini juga menerapkan kebijakan tertulis maupun tidak tertulis mengenai pendidikan perempuan di Afghanistan, diantaranya melarang pendidikan bersama antara laki – laki dan perempuan, pendidikan jenjang sekolah menengah bagi perempuan, jurusan tertentu bagi mahasiswi, ujian masuk universitas yang dilaksanakan tiap tahun bagi mahasiswi, serta melakukan pembatasan terhadap civitas akademika perempuan di institusi pendidikan.⁸⁰ Tidak terpenuhinya aspek akses dalam konsep kesetaraan gender bagi perempuan di Afghanistan menjadi salah satu tujuan UN Women kembali terjun ke Afghanistan demi mengupayakan kesetaraan gender melalui pengoptimalan akses pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan melalui peranannya sebagai Organisasi Internasional.

b. Partisipasi

Pada penelitian ini, perempuan di Afghanistan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan apa yang menjadi hak dasar bagi mereka. Hal ini kemudian berlanjut pada pengecualian perempuan dari segala bentuk pengambilan keputusan di pemerintahan Afghanistan seperti yang telah disampaikan oleh

⁸⁰ Op. Cit, USIP, hal 2.

Fawzia Koofi pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.⁸¹ Minimnya partisipasi perempuan baik di masyarakat maupun di pemerintahan Afghanistan kemudian membuat perempuan di Afghanistan tak berdaya ketika dihadapkan dengan kebijakan larangan pendidikan bagi perempuan yang dibuat oleh pemerintah Afghanistan rezim Taliban baru ini. Selain itu, pembatasan terhadap partisipasi perempuan dalam mengenyam pendidikan juga membuktikan adanya ketidaksetaraan gender di tengah kehidupan bermasyarakat di Afghanistan.

c. Kontrol

Kontrol yang dimaksudkan pada konsep kesetaraan gender ini ialah ketika perempuan atau laki – laki dapat memiliki jabatan maupun memiliki tanggung jawab kekuasaan di tingkatan masyarakat hingga pemerintah sehingga dapat membuat suatu keputusan. Namun, pada penelitian ini, perempuan di Afghanistan kemudian dikecualikan dari pekerjaan terutama yang berhubungan dengan pemangku jabatan ataupun tanggung jawab kekuasaan di sektor manapun.⁸² Perempuan di Afghanistan tidak memiliki kekuatan atau wewenang dalam mengambil keputusan atau bertindak sehingga tidak dapat mengontrol suatu aspek seperti munculnya kebijakan larangan pendidikan yang dikeluarkan oleh Rezim Taliban Baru.

⁸¹ Op. Cit, UN Women, *Pemimpin Perempuan Afghanistan Berbicara di PBB: “Berikan Kami Tempat Duduk di Meja Perundingan”*.

⁸² Kompas, (2023), *Perempuan Dilarang Bekerja, 3.300 Staf PBB Afghanistan Diam di Rumah*, Kompas.com, diakses pada <https://www.kompas.com/global/read/2023/04/07/170000170/perempuan-dilarang-bekerja-3.300-staf-pbb-afghanistan-diam-di-rumah>, (26/03/2024, 14.29 WIB)

d. Manfaat

Kebermanfaatannya yang diperoleh secara setara baik bagi laki – laki maupun perempuan juga termasuk ke dalam aspek kesetaraan gender. Hal ini dapat berupa kebijakan atau keputusan yang berdampak kepada kedua gender dengan setara seperti keputusan yang diambil oleh suatu kepala daerah haruslah memberikan manfaat yang setara dengan cara perolehan yang adil baik bagi perempuan maupun laki – laki yang terdapat di daerahnya. Namun, perempuan di Afghanistan mengalami tindakan diskriminasi di sektor pendidikan yang membuat perempuan di Afghanistan tidak dapat memperoleh suatu manfaat dari ataupun mengenyam pendidikan dengan cara yang setara.

